


Revitalisasi Pengelolaan Bumdes Dalam Rangka Mendukung Desa Mandiri Dan Berkelanjutan

¹Nurlita Novianti*, ²Yuki Firmanto, ³Anita Wijayanti, ⁴Putu Prima Wulandari

¹Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Corresponding: nurlita@ub.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: BUMDes Dana desa Digitalisasi Manajemen keuangan Pengabdian masyarakat	Menurut APBN 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 68 Triliun. Porsi penggunaan dana desa meliputi 30 persen untuk operasional pelayanan desa dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan potensi usaha desa. Alokasi dana desa harus digunakan untuk mengoptimalkan potensi desa sehingga dapat meningkatkan penerimaan asli desa (PADes). Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui sinergi bersama antara pemerintah desa dan akademisi, manajemen dan pelaporan keuangan desa maupun BUMDes diharapkan dapat menjadi lebih teratur, transparan dan efisien. Metode pengabdian masyarakat yang dipilih adalah metode Community Development dengan lima tahapan kegiatan yaitu engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian diikuti oleh dosen dan mahasiswa selama dua bulan di masing-masing desa mitra yang telah ditetapkan. Program pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada mitra antara lain penyusunan AD/ART BUMDes, pembuatan roadmap bisnis BMC (Business Model Canva) dan manajemen proyek berbasis feasibility study. Adapun indikator keberhasilan pengabdian masyarakat ini ditandai dengan adanya output, outcome, keterlibatan mahasiswa, presentasi pada seminar nasional dan internasional serta adanya kontrol rutin berkelanjutan pasca pengabdian.
Keywords: BUMDes Village funds Digitalization Financial management Community servicedigitalization	ABSTRACT According to the 2022 APBN, the Government has allocated a village fund budget of IDR 68 trillion. The portion of the use of village funds includes 30 percent for village service operations and 70 percent for community empowerment and development of village business potential. Village fund allocations must be used to optimize village potential so as to increase village original revenues (PADes). One way is to develop Village-Owned Enterprises (BUMDes). Through joint synergy between the village government and academics, village and BUMDes financial management and reporting are expected to become more organized, transparent and efficient. The community service method chosen is the Community Development method with five stages of activity namely engagement, assessment, planning, implementation, and evaluation. The service was carried out by lecturers and students for two months in each of the designated partner villages. The mentoring and training programs provided to partners include drafting BUMDes AD/ART, making BMC (Business Model Canva) business roadmaps and project management based on feasibility studies. The indicators of the success of community service are marked by output, outcome, student involvement, presentations at national and international seminars as well as continuous post-service control.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Pada kondisi perekonomian sekarang ini desa mendapatkan anggaran dana desa yang relatif besar dari pemerintah. Dengan adanya peningkatan anggaran dana desa turut menjadikan sumber pemasukan desa juga ikut meningkat. Anggaran dana desa yang diberikan harus digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Namun disisi lain besarnya dana desa juga menyebabkan permasalahan baru mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia perangkat desa yang cenderung minim

pengetahuan manajemen keuangan dan masyarakat desa yang kurang kritis terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga pengendalian dan pengawasan dana desa belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu dikeluarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa.

Menurut data Kementerian Keuangan RI (2022), bahwa APBN 2022 pagu dana desa sebesar Rp 68 Triliun yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten / kota diseluruh Indonesia. Dana sebesar itu diharapkan dapat mengatasi ketimpangan di daerah baik dari sisi layanan kesehatan, pendidikan, sosial maupun infrastruktur . Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa, 30% dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembiayaan operasional desa, biaya BPD dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan di bidang kesehatan. pendidikan dan ekonomi masyarakat serta bantuan keuangan kepada BUMDes (KPPN Bukittinggi, 2021).

Adanya BUMDes dapat mendorong perkembangan unit bisnis yang sebelumnya sudah ada di desa. BUMDes memiliki tiga peran utama. Pertama, BUMDes sebagai lembaga yang menyediakan dan mempersiapkan layanan umum bagi masyarakat desa. Kedua, BUMDes sebagai lembaga yang dapat meningkatkan pemanfaatan aset desa dan yang terakhir BUMDes bisa menjadi pendukung bagi usaha yang dimiliki masyarakat desa.

Bantuan keuangan kepada BUMDes ditujukan untuk menggali potensi ekonomi desa. Salah satu potensi desa yang saat ini sedang gencar dibangun oleh BUMDes adalah sektor wisata. Hal tersebut dapat membuat pendapatan asli desa (PADes) meningkat sehingga perekonomian desa itu sendiri juga bisa berkembang. Sebab itu, perlu adanya pengelolaan dana yang tepat agar tidak terjadi fraud dan penggunaan dana desa maupun PADes dapat dipertanggungjawabkan. Program dana desa dan peningkatan potensi ekonomi desa yang tergolong baru, membuat pengguna dana kesulitan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Sehingga perlu adanya insight lebih dalam terkait pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Permasalahan ini sejalan dengan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya 2021-2025 yakni meningkatkan kemanfaatan IPTEK perguruan tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya diharapkan adanya sinergi bersama antara akademisi dari Universitas Brawijaya dan Masyarakat desa untuk mewujudkan desa wisata yang unggul dan mandiri.

Kegiatan pengabdian masyarakat akan dilakukan di desa wilayah Kecamatan Ngoro dan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Besaran alokasi anggaran dana desa tahun 2022 Kecamatan Ngoro sebesar Rp 9.157.919.000 (Mujib, 2021). Sedangkan Kecamatan Kutorejo sebesar Rp 8.078.244.000 (Nuryadi, 2022). Besaran alokasi dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan potensi masing-masing kecamatan. Pasca pandemi covid-19, sektor wisata di desa memerlukan adanya inovasi karena banyak tempat wisata yang sedang berlomba-lomba memperbaiki sarana dan prasarana guna menarik wisatawan. Wisatawan saat ini lebih menyukai suasana yang asri, Kecamatan Ngoro memiliki beberapa potensi wisata alam antara lain Ranu Menduro, Sumber Wuluh, Sumber Gadung, Candi Bangkal, Candi Jedong dan Candi Genting. Sedangkan Kecamatan Kutorejo memiliki beberapa potensi wisata alam seperti Grojokan Jowinong, Prosotan Tengah Sawah, dan Taman Kehati di TPA Karangdiyeng.

Kombinasi alokasi dana desa yang besar dan potensi wisata yang menjanjikan seharusnya dapat membuahkan hasil yang optimal bagi desa melalui peran BUMDes. Namun hasil analisis awal menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan di dalam manajemen keuangan dan bisnis BUMDes di kedua kecamatan tersebut. Masalah yang pertama yaitu belum adanya aturan yang jelas dan resmi terkait pola pelaksanaan BUMDes. Belum adanya dasar dan ketentuan ini membuat BUMDes tidak dapat beroperasi secara terarah. Kemudian yang kedua adalah BUMDes belum memiliki roadmap bisnis jangka panjang sebagai panduan dalam pengembangan usaha. Akibatnya, BUMDes cenderung berjalan tanpa target yang jelas. Hal itu membuat kinerja BUMDes sulit untuk dievaluasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, solusi yang dapat diberikan adalah program pendampingan dan pengelolaan manajemen keuangan dan bisnis kepada SDM pengelola dana desa supaya dana desa dapat dikelola dengan baik dan benar. Adapun materi yang akan diberikan selama pendampingan antara lain cara penyusunan AD/ART BUMDes, roadmap bisnis berbasis BMC (Business Model Canvas) dan manajemen proyek menggunakan teori feasibility study.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia desa yang paham manajemen keuangan dan bisnis. Sehingga dana desa dapat dimanfaatkan desa secara optimal dan

berkelanjutan. Serta dapat menambah pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

II. MASALAH

a. BUMDes

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, mengembangkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan untuk kesejahteraan desa. Adapun tujuan BUMDes pada pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, melakukan kegiatan pelayanan umum, pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi digital desa.

Persyaratan pembentukan BUMDes pada suatu wilayah desa tertera pada pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 2021 dimana BUMDes dapat didirikan oleh 1 desa atau 2 desa lebih berdasarkan musyawarah mufakat dan telah ditetapkan oleh peraturan bersama kepala desa (bila dibuat lebih dari 1 desa). Namun BUMDes yang didirikan harus berdasarkan kesamaan potensi wilayah, kegiatan usaha, dan kedekatan wilayah.

b. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan adanya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

c. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Adapun makna lain dari proses konversi dari analog ke digital adalah proses berubahnya metode konvensional menjadi metode yang lebih modern. Hal ini juga berkaitan dengan metode pencatatan keuangan yang ada pada BUMDes.

Pada khalayak umum, ada beberapa BUMDes yang masih mencatat dalam pencatatan keuangannya menggunakan buku sehingga tidak memungkinkan adanya integrasi dan keefektifitas dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan digitalisasi. Digitalisasi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyajian informasi keuangan (Binti, 2021).

d. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini mencakup bagaimana dana dikumpulkan (fundraising) dan bagaimana uang tersebut digunakan (funding). Manajer keuangan (CFO) bertugas menentukan jumlah aset yang tepat dengan berinvestasi pada berbagai aset dan memilih sumber dana untuk membiayai aset tersebut.

Perencanaan keuangan yaitu perencanaan pemasukan, pengeluaran dan kegiatan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Penganggaran keuangan mengikuti perencanaan keuangan dengan merinci pengeluaran dan pendapatan. Pengelolaan keuangan yaitu menggunakan modal perusahaan untuk memaksimalkan modal yang tersedia dengan berbagai cara. Riset keuangan, khususnya mencari dan memanfaatkan sumber modal yang ada untuk kegiatan produksi dan usaha perusahaan. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan dan menyimpan dana tersebut dengan aman. Pengendalian keuangan, khususnya menilai dan meningkatkan keuangan perusahaan dan sistem keuangan. Audit keuangan, yaitu melakukan audit internal terhadap keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi kesalahan.

Tahap tahap manajemen berhubungan dengan tiga aktivitas manajemen keuangan yakni Allocation of funds (aktivitas penggunaan dana) yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk: Financial assets (aktiva finansial) yaitu selebar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya: saham, sertifikat deposito, atau obligasi, real assets (aktiva riil) yaitu aktiva nyata: tanah, bangunan, peralatan. Raising of funds (aktivitas perolehan dana) yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Manajemen assets (aktivitas pengelolaan aktiva) yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva-aktiva harus dikelola se-efisien mungkin (Mulyanti, 2017).

III. METODE

Metode pelaksanaan pada pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode pengembangan masyarakat (Community Development). Metode pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk meningkatkan akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik [5]. Terdapat lima tahap dalam metode ini yaitu engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi [5].

Tahapan dalam metode pengembangan masyarakat antara lain tahap engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap engagement, dosen pengusul melakukan pencarian desa yang membutuhkan pendampingan keuangan dan bisnis. Setelah menemukan objek pengabdian, dosen beserta perwakilan mahasiswa pengabdian survei langsung ke lokasi. Dosen dan perwakilan mahasiswa berinteraksi dengan kepala desa beserta perwakilan BUMDes memastikan kebutuhan terkait pengetahuan dan implementasi pengelolaan keuangan dan bisnis. Kegiatan akhir pada tahap ini yaitu mengidentifikasi lebih dalam permasalahan keuangan serta potensi bisnis dan solusi yang diharapkan mitra atas pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya adalah tahap assessment. setelah memahami permasalahan dan solusi yang diharapkan mitra, dosen dan mahasiswa pengabdian melakukan penilaian untuk menentukan beberapa target prioritas selama pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di semua desa di wilayah Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Kutorejo. Prioritas pertama adalah menjelaskan dan mengimplementasikan pembuatan AD/ART BUMDes sebab BUMDes sebagai tombak bisnis desa memerlukan aturan jelas mengenai prosedurnya. Prioritas kedua yakni membina mitra untuk membuat BMC (Business Canva Model). Pembuatan BMC sangat diperlukan mengingat adanya potensi wisata yang dapat menjadi sumber pendapatan desa. BMC akan menjadi dasar pondasi dalam membuat dan melaksanakan bisnis baru. Prioritas ketiga yakni pendampingan dan pengajaran metode feasibility study untuk menilai prospek dari setiap proyek baru. Kombinasi BMC dan feasibility study akan menghasilkan perencanaan yang lebih matang dalam membangun suatu usaha.

Pada tahap planning, Dosen dan perwakilan mahasiswa membuat jadwal dan biaya kegiatan. Pada hari berikutnya dosen bersama seluruh mahasiswa pengabdian memaparkan jadwal, biaya kegiatan dan mendiskusikan peralatan serta bahan yang diperlukan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Mahasiswa pengabdian dibagi menjadi dua kelompok besar dan selama satu minggu akan diawasi dosen dalam pembuatan materi yang berkaitan dengan regulasi pembuatan AD ART dan BMC. Selain itu mahasiswa dan dosen juga membuat materi terkait feasibility study yang sudah disesuaikan dengan salah satu usaha yang akan dibangun di suatu desa.

Setelah persiapan matang, dosen dan mahasiswa beralih ke tahap implementasi. Tahapan ini dilaksanakan langsung ke lokasi mitra dan dilakukan selama dua bulan. Selama berada disana mahasiswa melakukan pembinaan pada hari kerja yaitu hari senin sampai jumat. Pada sela-sela pendampingan para dosen juga akan memberikan penguatan materi yang harus dilakukan oleh mitra. Selama proses pendampingan dan pelatihan, setiap minggunya akan dilakukan evaluasi rutin kepada mitra. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan pengabdian Masyarakat dapat berjalan dan hasil yang diberikan juga dapat maksimal.

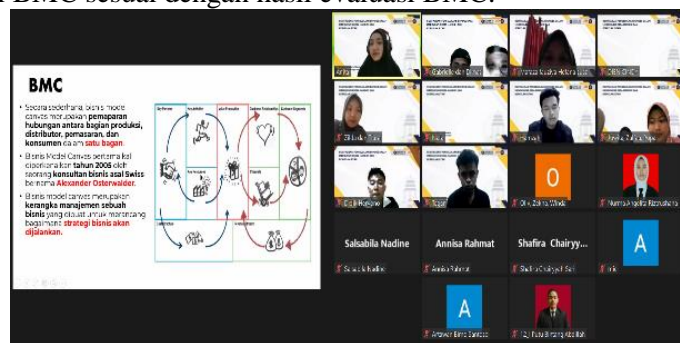
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan ilmu dan pengetahuan akuntansi, khususnya yakni akuntansi biaya dan kewirausahaan. Akuntansi biaya menjadi ilmu dasar dalam penerapan efisiensi biaya dana desa dalam pembangunan maupun implementasi desa wisata. kewirausahaan menjadi ilmu dasar dalam penyusunan BMC dan feasibility study. Untuk tahap implementasi diawali dengan penjelasan materi penyusunan AD/ART BUMDes oleh dosen pengabdian kepada mitra. Pada hari selanjutnya selama dua minggu mahasiswa pengabdian mendampingi BUMDes di setiap desa untuk Menyusun AD/ART BUMDes. Pada minggu ketiga, mitra bersama dosen pengabdian melakukan evaluasi bersama mengenai isi dari AD/ART BUMDes. Pada minggu tersebut mahasiswa pengabdian mendampingi mitra untuk memperbaiki AD/ART BUMDes berdasarkan hasil evaluasi bersama dosen pengabdian.



Gambar 1. Pemaparan materi AD/ART BUMDes

Pada minggu keempat, dosen pengabdian menjelaskan pentingnya BMC bagi pelaku usaha dan menjelaskan Langkah-langkah penyusunan BMC. Pada minggu tersebut mitra dibantu mahasiswa pengabdian mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan BMC yang akan dilaksanakan di minggu kelima. Pada minggu keenam, mitra bersama dosen pengabdian melakukan evaluasi bersama mengenai hasil penyusunan BMC di setiap BUMDes. Pada hari berikutnya setelah evaluasi, mitra bersama mahasiswa pengabdian memperbaiki BMC sesuai dengan hasil evaluasi BMC.



Gambar 2. Pemaparan materi BMC

Pada minggu ketujuh, dosen memberikan materi terkait feasibility study. Pada hari berikutnya, mitra bersama mahasiswa pengabdian Menyusun feasibility study. Pada minggu selanjutnya dosen melakukan evaluasi dari hasil penyusunan feasibility study setiap BUMDes. Pada minggu ini juga mahasiswa pengabdian mendampingi mitra untuk menyempurnakan feasibility study berdasarkan masukan yang didapat pada sesi evaluasi.



Gambar 3. Evaluasi Feasibility Study

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu penerbitan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), berikut adalah indikator keberhasilan yang disusun selama pengabdian masyarakat dijalankan:

Table 1. Indikator Keberhasilan Pengabdian

No.	Indikator Keberhasilan	Deskripsi
1.	Keluaran (<i>output</i>) Hasil Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tersusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUMdes • Sudah tersusun BMC (Business Model Canva) untuk usaha yang akan dijalankan oleh desa serta bagi usaha yang sudah berjalan namun masih belum ada BMC • Sudah tersusun <i>feasibility study</i> untuk setiap usaha desa sebagai salah satu acuan pelaksanaan bisnis desa.
2.	Dampak (<i>outcome</i>) Hasil Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan BUMDes selaku tombak bisnis desa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan berjalan secara sistematis • Usaha yang berada di bawah naungan desa sudah memiliki arah tujuan bisnis serta sudah mengetahui urutan Langkah-langkah dalam membangun maupun menjalankan bisnis.
3.	Keterlibatan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa membina mitra dalam penyusunan AD ART BUMDes • Mahasiswa melakukan pendampingan dan pelatihan secara intensif mengenai ilmu akuntansi yang menjadi bagian dari pembentukan BMC (Business Model Canva) • Mahasiswa mendampingi unit bisnis desa dalam Menyusun <i>feasibility study</i>
4.	Presentasi pada seminar nasional dan Internasional	Rencana penerbitan artikel jurnal
5.	Kontrol penerapan pengabdian masyarakat yang dilakukan Mahasiswa kepada mitra	Adanya kontrol dosen kepada mitra di semester kedua pada tahun 2023 terkait pelaksanaan penyusunan AD ART BUMDes, BMC, dan <i>feasibility study</i> . Jika mitra mengalami kesulitan maka dosen memberikan solusi dan penjelasan secara daring kepada BUMDes

maupun unit bisnis. Hal ini dilakukan agar hasil dari pengabdian masyarakat berkelanjutan bagi desa.
--

V. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Ngoro dan Kutorejo menggunakan metode pengembangan masyarakat (Community Development) dan melalui lima tahapan yaitu engagement, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang berlangsung selama dua bulan di masing-masing desa mitra. Beberapa solusi yang diberikan oleh tim pengabdian antara lain:

- Pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis teknologi.
- Pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan AD/ART BUMDes, BMC (Business Model Canva) dan manajemen proyek berbasis feasibility study.
- Pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan kepada BUMDes, karena BUMDes merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa wisata.

Melalui program pengabdian ini pemerintah desa maupun pengelola BUMDes diharapkan untuk bersama-sama mengelola usaha desa secara mandiri mulai dari pengembangan investasi, produktivitas kerja hingga inovasi produk desa. Selain itu, materi BMC, metode feasibility study dan laporan keuangan yang sudah dibuat dan diajarkan dapat terus digunakan oleh mitra lebih-lebih lagi dapat ditularkan ke desa lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mewakili tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terutama kepada mitra desa, BUMDes dan pemberi dana bantuan hibah yang turut menyokong dan ikut menyukseskan program ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Binti, Rawintan Endas, dkk. 2021. Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*. Vol 1, 47-58
- Kementerian Keuangan RI. 2022. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022 [online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>. Diakses pada 10 Februari 2023
- KPPN Bukittinggi. 2021. Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya [online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>. Diakses pada 11 Februari 2023
- Mujib. 2021. Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 – 2026 [online]. Available: <https://ngoro.mojokertokab.go.id/files/downloads/1663744745-8821.pdf>. Diakses pada 11 Februari 2023
- Mulyanti, Dety. 2017. Manajemen Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akutansi*. Vol 8, 62-71
- Nuryadi. 2022. Laporan Konerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 Kecamatan Kutorejo [online]. Available: <https://kutorejo.mojokertokab.go.id/files/downloads/1658816309-1851.pdf>. Diakses pada 11 Februari 2023
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BUMDes [online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>. Diakses pada 11 Februari 2023
- Triyono, Agus. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk. Pabrik Cilacap”, J.Komuniti, vol. VI, no. 2